

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Prioritas utama pada negara berkembang salah satunya adalah melaksanakan kegiatan kenegaraan yaitu dengan pembangunan nasional, begitu pula dengan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia merupakan bagian dari pembangunan industri, sehingga pembangunan industri diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pembangunan ekonomi, politik dan sosial Indonesia. Selain pertumbuhan industri, maka pertumbuhan ekonomi kerakyatan juga mampu untuk memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional Indonesia.

Potensi pertumbuhan ekonomi kerakyatan diantaranya seperti Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perdagangan serta industri terus meningkat. Dimana potensi tersebut dapat dikembangkan secara langsung melalui gerakan koperasi dan UMKM. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur penting penggerak ekonomi kerakyatan yang dapat membantu pemerintah dalam pengetasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Beberapa program misalnya yang terus dilakukan seperti pengembangan Koperasi dan UMKM dengan pemberdayaan dan peningkatan kelembagaan.

Keberadaan UMKM dalam hal ini bukan saja untuk meningkatkan pendapatan, akan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal

tersebut bisa dipahami karena sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melibatkan banyak orang dengan beraneka ragam usaha. Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam upaya menyerap tenaga kerja sehingga menambah sumber pendapatan masyarakat sekitar serta menambah pendapatan daerah. UMKM juga memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mudrajat Kuncoro (2007: 364), bahwa pengembangan industri kecil adalah cara yang dinilai besar perannya dalam pengembangan industri manufaktur. Masalah pengangguran bisa diatasi dengan pengembangan industri kecil karena mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya. Sehingga dengan teknologi tersebut bisa memperbesar lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, yang akhirnya mampu mendorong pembangunan daerah dan kawasan perdesaan.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai komitmen dengan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu dengan UMKM dan koperasi. Namun, keberadaan dari UMKM ini bukan berarti tanpa masalah, permasalahan UMKM berkaitan dengan permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UMKM. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari

pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran penting terhadap industri kecil batik di kabupaten Sleman dan dibutuhkan, karena usaha ini memerlukan dukungan beberapa hal di antaranya: teknologi, modal usaha, pemasaran, manajemen, organisasi, serta berbagai macam pelatihan dan monitoring dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksanaan kegiatan Pemerintah dalam bidang pengembangan dan pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melakukan tugasnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki beberapa fungsi di antaranya Pengawasan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengendalian di bidang koperasi. Selain itu, mempunyai kewenangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, tugas-tugas pembinaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan dalam bidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Sleman bahwa terdapat Asosiasi Batik di Kabupaten Sleman yang bernama Asosiasi Batik Mukti Manunggal, yang dimanfaatkan para anggota atau masyarakat yang tergabung sebagai tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan, baik itu proses produksi, manajemen maupun pemasaran. Asosiasi Batik Mukti Manunggal menjadi tempat untuk para anggota/ masyarakatnya, supaya menjadikan

UKM yang berkarakter serta berkualitas. Berikut adalah daftar dari Asosiasi

Batik Mukti Manunggal:

Tabel 1.1 Daftar Asosiasi Batik Mukti Manunggal

<b>Nama Kelompok</b>	<b>Jumlah Pengrajin</b>
Ayu Arimbi	30
Larasati	28
Parang Gupito	27
Sekar Sari	27
Dewi Kunthi	26
Arum Sari	23
Sekar Dadi	23
Sekar Giri	22
Pojok Srikandi	22
Mekar Arum	22
Sekar Kawung	22
Srikandi Merapi	21
Sekar Jati Mas	21
Tirto Ayu	21
Mavee	20
Mantaran	20
Ery Batik	20
Parang Kaliurang	20
Marenggo	20
Omah Batik Sekar Turi	20
Mekar Lestari	20
T-Ray Art	19
Merdikorejo Batik	19
Abi Rupa Batik	19
Batiqu Batik	19
Modinan	19
Gig's Batik	18

Berdasarkan data tersebut di atas, peneliti mengambil objek di Kelompok Batik Ayu Arimbi yang terletak di kawasan Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman dikarenakan jumlah pengrajinnya dan tenaga kerjanya paling banyak dibandingkan dengan kelompok batik lainnya. Selain itu juga di kelompok batik Ayu Arimbi, motif batik

andalannya adalah Sinom Parijotho Salak, yang berupa elemen tangkai, daun, bunga pariyo, daun salak, hingga bunga salak. Keunikan batik yang ada di kawasan Plalangan, teknik batik yang boleh dilakukan oleh para pengrajin batik maksimal dilakukan dengan teknik cap dan juga pengrajin batik di kawasan tersebut dilarang untuk menggunakan teknik printing. Bagi para masyarakat di daerah Kawasan batik Plalangan Kabupaten Sleman, berkecimpung di industri rumah tangga adalah kesempatan supaya bisa untuk mengembangkan keahlian dan lapangan pekerjaan. Usaha kecil dan Menengah yaitu industri kecil batik dalam hal ini memiliki peran untuk tempat pengembangan diri dalam usaha untuk memperoleh taraf hidup lebih baik.

Sedangkan berdasarkan data jumlah Usaha Menengah Kecil (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman menduduki ranking tertinggi. Hal itu diungkap dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi tahun 2016, kemudian menjadi lanjutan dari pendataan UMK dan UMB tahun 2017, Sleman menempatkan posisi tertinggi jumlah Usaha menengah Kecil (UMK) sebesar 29.09 persen. Usaha Menengah Besar (UMB) daerah Sleman mencapai angka 42,26 persen. UMKM baik mikro, kecil dan menengah telah mencapai angka 27.119 dan paling banyak ada di Kabupaten Sleman yaitu 2.535, dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Depok yaitu 689. UMK dan UMB sensus ekonomi tahun 2016 juga dipakai sebagai dasar untuk merumuskan berbagai kebijakan dan

analisis baik makro dan mikro. Hasil sensus tersebut digunakan juga untuk basis data berbagai lembaga survei lanjutan dalam bidang ekonomi.

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/28/otrzuz428-jumlah-usaha-menengah-kecil-sleman-tertinggi-di-yogya>).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BATIK DI KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2017-2018**”. **Studi kasus di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi pemberdayaan industri kecil pada kelompok batik Ayu Arimbi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo Kabupaten Sleman Periode 2017-2018.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo Kabupaten Sleman Periode 2017-2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Untuk memberi rekomendasi juga informasi kepada aparatur instansi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di kawasan batik Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman. Maupun untuk komponen masyarakat terkait strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo Kabupaten Sleman Periode 2017-2018.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian dan pengembangan kajian tentang strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo Kabupaten Sleman Periode 2017-2018.

#### **E. Studi Terdahulu**

Edy Suandi Hamid dan Sri Susilo (2011) dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian didapatkan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi UMKM Provinsi DIY: 1) yaitu terkait pemasaran, 2) berkaitan dengan modal dan juga pendanaan, 3) Inovasi dan sarana pemanfaatan teknologi informasi, 4) Penggunaan dan pemakaian bahan baku, 5) Berbagai peralatan produksi, 6) Penyerapan dan upaya pemberdayaan tenaga kerja, 7) Perencanaan pengembangan usaha, 8) Kesiapan untuk menghadapi tantangan dari lingkungan eksternal. Untuk mengembangkan UMKM, tidak dibebankan hanya pada UMKM itu sendiri akan tetapi harus dapat memperoleh dukungan dari seluruh *stake-holders*. Dukungan tersebut diharapkan datang dari berbagai kalangan seperti asosiasi pengusaha, perguruan tinggi maupun dinas atau instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan Propinsi. Kemudian diperlukan juga kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya merupakan percepatan transformasi UMKM dari fase formasi selanjutnya menuju fase stabilisasi. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018.

Marzuki (2011) Pemberdayaan UMKM Dalam Peningkatkan Perekonomian Lokal (Studi kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dan Pada Sentra Industri Batik di Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan). Hasil penelitiannya yaitu: 1) Peran dari pemerintah (DISPERINDAG) dalam upaya pemberdayaan UMKM Batik di Desa Tanjung Bumi yaitu melakukan studi banding ke Bali untuk melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Disamping itu UMKM diberi peralatan berupa alat produksi, pembuatan website yang ditujukan untuk para pengrajin dan pengusaha supaya dapat bersaing dalam berbagai produk dari daerah lain, diharapkan pula untuk pengrajin batik agar tidak buta teknologi. Hal tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Jatim dan disosialisasikan untuk masyarakat supaya bisa mengikuti berbagai pameran yang telah diadakan seperti di Gramedia Surabaya, Semarang, Solo dan Jakarta. Apabila pengrajin batik bisa memenuhi target kriteria yang di tetapkan, langsung akan diberi bantuan berupa pengkreditan bunga 6% selama setahun. Selama ini belum terdapat bantuan berupa modal untuk pengrajin batik oleh pemerintah, sehingga pemberian permodalan yaitu dari pengusaha batik itu sendiri bekerjasama dengan pengrajin. Adanya UMKM Kabupaten Bangkalan, Desa Tanjung Bumi diharapkan bisa membantu dalam hal mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut karena adanya beberapa pengrajin batik yang telah merekrut beberapa pegawai

untuk dilibatkan kedalam pelatihan (ukir dan manajemen) atau pameran, 2) Kemudian hubungan pemerintah yaitu DESPERINDAG dalam upaya pemberdayaan UMKM dengan masyarakat terhadap sentra Batik di Desa Tanjung Bumi terjalin kurang baik, yang tidak pernah memberikan motivasi ataupun dukungan pada industri kecil melainkan pengusaha besar yang telah menghasilkan banyak produk yang aktif di dukung Pemerintah daerah. Berbeda dalam hal ini yang disampaikan Kepala Bidang Usaha Industri, yaitu UMKM telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Peningkatan akses UMKM untuk Perbankan saling berkaitan, pemerintah daerah mengusahakan kualitas pendamping UMKM dengan memberikan bimbingan dan pelatihan teknis kepada pendamping UMKM. Baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pendamping Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan lembaga swasta (BDS). Keberhasilan Program Pemberdayaan terhadap UMKM tolak ukurnya yaitu pengangguran jumlahnya menurun dengan terserapnya tenaga kerja sebesar 40 pekerja dan 20 pekerja tetap di pesona batik yang telah direkrut. Sedangkan di luar ada lebih dari 200 pekerja yang secara tidak langsung telah berusaha mengurangi penduduk miskin di Desa Tanjung Bumi, hal ini telah berkembang dan bisa mandiri rata-rata dari pendapatan batik tersebut. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Peningkatkan Perekonomian Lokal (Studi Pada DESPERINDAG dan Pada Sentra Industri Batik di Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan) sedangkan

penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang UMKM sentra Batik.

Sudantoko (2010) dengan judul Pemberdayaan Industri Batik Skala Kecil Di Jawa Tengah (Studi di Kabupaten dan Kota Pekalongan). Hasil penelitian terdapat variabel bahan penolong, bahan baku, kayu bakar serta minyak tanah, tenaga kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap produksi batik dalam skala kecil, tetapi untuk luas usaha dan variabel peralatan secara signifikan tidak begitu pengaruh. Kemudian tingkat efisiensi teknis terhadap pelaku usaha batik skala kecil di daerah tersebut belum efisien, nilai rata-ratanya (0,867). Sedangkan analisis untuk efisiensi alokatif berupa penggunaan peralatan, bahan baku, luas usaha namun nilainya tidak efisien dan kurang dari 1. Kurang dari 50% bahwa tingkat keberdayaan untuk pelaku usaha batik skala kecil masih rendah. Strategi pemberdayaan dalam pengembangan usaha batik skala kecil, berdasarkan beberapa akses utama mencakup pasar, usaha, teknologi, SDM beserta pihak terkait masih dalam prioritas jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang menjadi prioritas utama adalah dengan melakukan pelatihan berupa manajemen, produksi kreativitas, monitoring serta pengawasan, menyediakan rumah dagang maupun outlet, bermacam agenda pameran, leaflet; menyampaikan info pasar, teknologi baru dan pameran perdagangan, serta melakukan pelatihan

teknologi dan Sumber Daya Manusia. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Pemberdayaan Industri Batik Skala Kecil Di Jawa Tengah (Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Pekalongan) sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang UMKM sentra Batik.

Cahaya Prastika (2016) Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian bahwa pengembangan untuk jenis kerajinan kulit di Kabupaten Magetan telah berjalan baik berkat partisipasi pelaku UMKM serta peran dari pemerintah. Tipologi dari peran pemerintah adalah pemerintah memiliki peran terhadap penyediaan alat, seperti mesin jahit karena pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, kemudian pemerintah juga memberikan pelatihan serta menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM. Kemudian tipologi partisipasi pelaku dalam UMKM, terdapat pemanfaatan hasil karena pelaku UMKM telah mengikuti program pelatihan dan menggunakan mesin pemberian dari pemerintah. Hasil yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan UMKM kerajinan kulit yaitu meningkatkan kualitas produksi hingga menjadikan produk yang unggul di Kabupaten Magetan. Hal ini masih terkendala oleh berbagai masalah SDA yang semakin

berkurang dan memiliki skill rendah. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018.

Purwono Prihatmaji (2016) dengan judul Pendampingan Penyusunan Masterplan Sentra Batik Di Dusun Plalangan Pendowoharjo Sleman. Hasil penelitian didapatkan bahwa penetapan Dusun Plalangan sebagai sentra batik di Kabupaten Sleman menjadi permasalahan tersendiri bagi kelompok, diantaranya 1) Ketidakmampuan perajin dalam merencanakan pengembangan wilayah serta memetakan potensi, 2) Dalam menyusun masterplan kawasan, perajin masih kurang mampu, 3) ketidaksiapan perajin untuk memiliki *showroom* atau kawasan batik terpadu. Pendampingan program melalui penguatan SDA dan penguatan penggalian potensi di wilayah tersebut masih di perlukan dalam masyarakat. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Pendampingan Penyusunan Masterplan Sentra Batik Di Dusun Plalangan Pendowoharjo Sleman sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo,

Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Persamaannya adalah sama-sama mengambil objek sentra batik Di Dusun Plalangan.

Free Diyana (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman). Hasil penelitian didapatkan bahwa UMKM telah menerapkan pengelolaan keuangan berupa pencatatan dan penggunaan anggaran. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman) sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Persamaannya adalah sama-sama mengambil objek sentra batik.

Kurniyawan (2015) dengan judul Peran Pemerintah Kabupaten Dan UKM Dalam Pemberdayaan Pengrajin Batik Di Desa Tancep Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian didapatkan peran kelompok batik di Desa Tancep sudah baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kepada para pengrajin batik. Pada awalnya mereka menjadi pengrajin di daerah lain, tetapi sekarang telah mampu untuk berdiri sendiri dalam asosiasi kelompok batik. Beberapa bantuan telah diperoleh dari pemerintah dan lembaga UKM proses pemberdayaan berjalan dengan baik, walaupun peran Pemerintah Kabupaten dan Lembaga UKM

belum sempurna. Kendala utama dihadapi oleh para pengrajin diantaranya pemasaran media internet yang masih belum sesuai harapan. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Peran Pemerintah Kabupaten dan UKM Dalam Pemberdayaan Pengrajin Batik Di Desa Tancep Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Persamaannya adalah sama-sama mengambil objek pengrajin batik.

Ristiarini (2018) dengan judul Analisis Potensi Produk Industri Kecil Menengah: Studi Kasus Kabupaten Sleman. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengolahan data bobot yang dihasilkan dari masing-masing kriteria adalah Omset 0.190, tenaga kerja 0.148, bahan baku 0.205, jumlah produk 0.151, target pasar 0.197 dan jumlah perusahaan 0.109. Hasil analisis dan pengolahan data diperoleh dengan nilai preferensi setiap alternatif, Pengrajin Bambu sebagai produk unggulan di Sleman dengan nilai preferensi 1,0000, Pengrajin Tenun dengan nilai preferensi 0,7802, Pengrajin Genteng dengan nilai preferensi 0.7545, Pengrajin Batik dengan nilai preferensi 0.5242, Pengrajin Blangkon dengan nilai preferensi 0,5031, Pengrajin pasir semen nilai preferensinya 0,4740, dan selanjutnya Pengrajin Tahu dengan prefrensinya 0,3608 dan terakhir Pengrajin kayu. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Analisis Potensi Produk Industri Kecil Menengah: Studi Kasus Kabupaten Sleman menggunakan AHP sedangkan

penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018.

Andhiny Paramasari (2009) dengan judul Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian didapatkan bahwa strategi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dalam melakukan kegiatannya Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta yaitu dengan 1) Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM dan Fasilitasi Pengembangan UMKM, 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, 3) Penyelenggaraan Promosi untuk Produk UMKM. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Persamaannya sama-sama meneliti tentang Strategi Dinas Koperasi dan UKM.

Maulida Rusdiana (2016) dengan judul Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo untuk Meningkatkan Daya Saing UKM Batik pada Sentra UKM Kampoeng Batik

Jetis Sidoarjo. Hasil penelitian didapatkan bahwa 1) Perlunya kerjasama pihak terkait yaitu Bank Jatim sebagai mitra pemberian dana bergulir, juga melibatkan Maskapai Lion Air sebagai mitra dalam publikasi dan bersama Bappeda bekerjasama dengan konsultan dari Belanda, dalam upaya untuk pendampingan UKM, 2) Melakukan promosi diantaranya lewat pameran yang diadakan, media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan industri terkait beserta industri pendukung, 3) Mengenalkan dan memberikan informasi bagi konsumen melalui pameran, promosi, misi dagang dan juga menetapkan kebijakan wajib batik bagi pegawai instansi pemerintah untuk memperbarui kondisi permintaan, 4) Pemberian berupa pelatihan-pelatihan pemasaran, kemudian mengikutsertakan kedalam pameran, promosi dan misi dagang guna untuk memberi kemudahan supaya mendapatkan bantuan modal untuk memperbarui kondisi faktor. Perbedaan penelitian di atas meneliti tentang peningkatkan Daya Saing UKM Batik sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Persamaannya sama-sama Sentra UMKM Batik.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Strategi**

Pringgowidagda dalam Mulyadi dan Risminawati (2012:4) strategi yaitu merupakan suatu cara, taktik, teknik maupun siasat yang

dilakukan seseorang dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Menurut Surtikanti dan Santoso (2008:28) strategi dapat diartikan pula sebagai suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

Joni dalam Anitah (2008:124) menyatakan strategi merupakan ilmu maupun kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang telah dimiliki dan dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara, taktik, teknik, siasat, kiat dan ilmu dalam memanfaatkan segala sumber yang berisi garis besar haluan yang dilakukan seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Potter (1980 dalam Shaiku, 2009), bahwa proses pembuatan strategi terdiri dari 4 elemen, yaitu : 1) Identifikasi masalah-masalah strategis yang dihadapi oleh organisasi, 2) Pengembangan alternatif-alternatif strategi yang ada dengan mempertimbangkan strategi generik serta variasinya, 3) Evaluasi dari tiap alternatif, 4) Penentuan pemilihan strategi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia.

Menurut Koteen dalam Salusu (2012: 104-105), terdapat beberapa indikator/tipe strategi yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus strategi kelembagaan yaitu mengembangkan kemampuan yang dimiliki organisasi dalam melaksanakan inisiatif strategis.

b. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Memusatkan perhatian untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia, untuk peningkatan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya berupa tenaga kerja, teknologi dan keuangan.

c. Strategi Program (*Program Strategy*)

Memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

d. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif beberapa strategis baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

## 2. Pemberdayaan

Hikmat (2010:3) pemberdayaan yaitu merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan orang-orang secara konsekuen telah melaksanakan keputusan tersebut. Perencanaan yang akan dilakukan seseorang dalam kegiatan organisasi, baik itu berupa keputusan individu atau kolektif yang berdasarkan aturan dan norma

yang berlaku didalam organisasi merupakan hasil dari pengambilan keputusan tersebut.

Widjajanti (2011) pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kemampuan atau kekuatan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat menganalisis, mengidentifikasi, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi. Sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri.

Zubaedi (2009:42) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Hadi (2013) mengartikan konsep pemberdayaan sebagai pemberian kepercayaan kepada individu di dalam organisasi dan mendorongny kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Rifa'i (2013) pemberdayaan adalah upaya untuk memberdayakan yaitu mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Shardlow (2005) dalam (Rifa'i, 2013) menyatakan bahwa pemberdayaan intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok, maupun komunitas agar berusaha mengontrol kehidupannya sendiri dan mengusahakan membentuk masa depan untuk mereka sendiri

sesuai dengan apa yang diinginkan. Gagasan tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk mendorong klien melakukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien, sehingga klien memiliki kekuasaan penuh atas masa depannya.

Chambers (2005) dalam (Rifa'i, 2013) pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi dengan merangkul nilai sosial sehingga menggambarkan suatu paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centred, parsipatory, empowering and sustainable*.

Rukminto Adi (2010)77-78) dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna:

*“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.”* (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yaitu suatu upaya yang dilakukan orang maupun instansi terkait bertujuan untuk mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu hal yang menjadi objek untuk diberdayakan supaya berkembang dan tumbuh. Dalam hal ini yaitu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah di kawasan batik Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman.

Menurut Sumaryadi (2009:11), pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat supaya mereka dapat mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial berkelanjutan.

Huraerah (2009:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi untuk memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Rifa'i (2013) upaya untuk memberdayakan masyarakat meliputi: Pertama, memungkinkan (*enabling*), yaitu menciptakan suasana atau iklim dimana masyarakat dapat berkembang. Dalam hal ini titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap individu dan masyarakat mempunyai

potensi untuk dapat dikembangkan. Kedua, memberdayakan (*empowering*), yaitu memperkuat daya atau potensi yang ada di masyarakat. Diperlukan langkah yang lebih positif dan nyata dari sekedar penciptaan iklim atau suasana. Pada rangka pemberdayaan ini, upaya pokok yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan dan akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar fisik, seperti jalan, listrik dan fasilitas pelayanan dan kesehatan, serta ketersediaan lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Ketiga, melindungi (*protecting*), memberdayakan juga memiliki arti melindungi. Hal ini berarti memberi perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah untuk menghindari terjadinya yang lemah supaya tidak bertambah lemah dikarenakan kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kemampuan atau kekuatan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih berbagai macam alternatif pemecahannya secara mandiri.

Widjajanti (2011:16) keberdayaan masyarakat dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu 1) Kemampuan dalam pengambilan keputusan, 2) Kemandirian, dan 3) Kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Payne (2005) dalam (Rifa'i, 2013) menyatakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu menolong masyarakat supaya memperoleh daya sehingga dapat mengambil keputusan sekaligus menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait diri mereka sendiri, termasuk didalamnya mengurangi efek hambatan sosial dan pribadi dalam melaksanakan suatu tindakan.

### 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Suyahya (2017) termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 yaitu pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berikut:

- a. Usaha mikro, adalah badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro atau usaha produktif milik orang perorangan, sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang.

Suci (2017), kriteria UMKM Menurut Pasal 6 Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

1. Yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Yaitu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

1. Yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

1. Yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. **Industri Kecil**

Secara sederhana dalam kamus besar ekonomi (Winarno dan Ismaya, 2007: 252) menjelaskan definisi industri merupakan kegiatan ekonomi dengan kegiatan mengolah atau memproses bahan atau barang dengan menggunakan alat dan sarana berupa mesin, sehingga menghasilkan suatu barang (jadi) atau jasa.

Industri adalah proses kegiatan ekonomi dalam mengolah bahan baku, barang mentah, barang setengah jadi atau barang jadi, supaya dijadikan barang yang lebih tinggi harga jualnya dan kegunaannya.

Industri merupakan suatu kegiatan atau usaha dalam proses pengolahan barang setengah jadi atau barang mentah yang memiliki nilai tambah supaya mendapatkan keuntungan lebih. Secara umum pengertian industri beragam tetapi pengertiannya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya.

#### **G. Definisi Konseptual**

Menurut Notoatmodjo (2010:25) kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Definisi konsep digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah.

Mengacu pada konsep dan teori yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi konsep dalam penelitian ini :

1. Startegi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
2. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah merupakan cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu pemberdayaan industri kecil batik.
3. Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Industri Kecil Batik merupakan suatu kegiatan ekonomi batik dengan memproses atau mengolah bahan-bahan atau barang dengan menggunakan sarana dan peralatan untuk membuat batik, seperti mesin, untuk menghasilkan barang jadi berupa kain batik kemudian dibuat baju atau celana.

## **H. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan penelitian ini maka diperlukan operasionalisasi dari strategi pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi, maka indikator dari variabel penelitian tentang Strategi Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan industri kecil batik pada kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman Periode 2017-2018. Menurut Rifa'i (2013), bahwa indikator strategi pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Memungkinkan (*Enabling*) :
  - a. Penciptaan suasana atau iklim masyarakat
  - b. Potensi yang dikembangkan masyarakat
  - c. Membangun daya saing, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat

2. Memberdayakan (*Empowering*) :
  - a. Memperkuat daya atau potensi masyarakat
  - b. Meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
  - c. Lapangan pekerjaan dan pemasaran
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana
3. Melindungi (*Protecting*) :
  - a. Perlindungan keberdayaan masyarakat
  - b. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, selanjutnya disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

### **2. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman sedangkan subjek pada penelitian ini adalah kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh langsung dari orang atau pelaku yang dijadikan subjek penelitian seperti menggunakan hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap maupun pendukung data primer yang dapat berupa formulir, bukti, catatan serta dokumen-dokumen perusahaan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Jenis metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan melakukan percakapan dengan pihak informan, terkait dengan obyek yang akan diteliti. Teknik wawancaranya dilakukan secara terbuka (*open interview*) yaitu tanya jawab penulis dengan informan menggunakan panduan wawancara. Kemudian membuka kesempatan informan untuk memberikan pandangannya, maupun pendapat dari berbagai fenomena penelitian tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sangatlah diperlukan untuk membantu dan dimanfaatkan dalam memberikan sumber data untuk menafsirkan serta menguji kebenarannya. Kemudian tambahan dari beberapa bahan bacaan seperti *company profile*, makalah, jurnal atau majalah

dan lain-lain, yang isinya sesuai dengan tema penelitian sehingga dapat menjadi pedoman peneliti sebagai sumber informasi tambahan.

c. Observasi

Pengamatan yang akan dilaksanakan dengan menelusuri hasil wawancara kepada *key informan* dan direkam maupun dicatat menggunakan alat tulis. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan, yaitu dengan melihat secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah juga kelompok batik Ayu Arimbi di Dusun Plalangan Desa Pandowoharjo Kabupaten Sleman.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dari berbagai sumber informasi yang ada dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dalam upaya pemberdayaan industri kecil batik di Kabupaten Sleman.

## 5. Analisis data

Proses pengumpulan data dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut (Moleong, 2007: 117) yaitu:

1. Tahapan pertama, mulai dengan proses mereduksi data. Melakukan koding yang berkaitan dengan informasi penting, terkait masalah

penelitian kemudian dikelompokkan sesuai data permasalahan masing-masing topik.

2. Tahapan kedua, yaitu data kemudian dikelompokkan dan disusun dengan membentuk narasi, agar terbentuk suatu informasi yang sesuai permasalahan penelitian.
3. Tahapan ketiga, yaitu pengambilan kesimpulan. Didasarkan pada susunan narasi yang telah disusun secara rapi pada tahapan kedua, sehingga dapat memberikan jawaban berupa permasalahan penelitian.